

Strategi kepemimpinan dalam pengamanan Pemilu di wilayah hukum Polres Nias

Viktor Bastian Zendrato, Eliyunus Waruwu, Fatosola Hulu, Syah Abadi Mendrofa

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Nias

e-mail: zendratobastianzend@gmail.com

ARTICLE INFO

Received: February 2, 2024

Revised: February 20, 2024

Accepted: February 23, 2024

Published: February 23, 2024

KEYWORDS

election security, interagency collaboration, leadership strategies, legal compliance, Polres Nias, public trust, qualitative analysis

ABSTRACT

The study explores leadership strategies in election security within the jurisdiction of Polres Nias, highlighting the critical role of authoritative and effective leadership in ensuring safe, fair, and transparent elections. Employing a qualitative method, the research involved in-depth interviews with key figures, including the Head of Operations at Polres Nias, emphasizing the importance of openness, legal compliance, and interagency collaboration. Findings reveal that leadership responsibility and wisdom in power management significantly contribute to security, public trust, and stability during elections. The study concludes that successful election security strategies rely on leaders' authority, adaptability, and commitment to legal principles, highlighting the importance of developing such leadership qualities in law enforcement to bolster democracy through secure, fair, and transparent electoral processes.

©2024 Authors. Published by PT Delada Cahaya Masagro

This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International License

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi strategi kepemimpinan dalam keamanan pemilu di wilayah hukum Polres Nias, menyoroti peran penting kepemimpinan yang berwibawa dan efektif dalam memastikan pemilu yang aman, adil, dan transparan. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini melibatkan wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh kunci termasuk Kepala Bagian Operasi Polres Nias, Paur Dalops Sibbag, dan Paurmin Bag Ops yang menekankan pentingnya keterbukaan, kepatuhan hukum, dan kolaborasi antarlembaga. Temuan menunjukkan bahwa tanggung jawab kepemimpinan dan kebijaksanaan dalam manajemen kekuasaan secara signifikan berkontribusi terhadap keamanan, kepercayaan publik, dan stabilitas selama pemilu. Studi ini menyimpulkan bahwa strategi keamanan pemilu yang sukses bergantung pada otoritas, kemampuan beradaptasi, dan komitmen para pemimpin terhadap prinsip-prinsip hukum, yang menggarisbawahi pentingnya mengembangkan kualitas kepemimpinan seperti itu dalam penegakan hukum untuk meningkatkan demokrasi melalui proses pemilu yang aman, adil, dan transparan.

Kata kunci: analisis kualitatif, keamanan pemilu, kepatuhan hukum, kepercayaan publik, kolaborasi antar lembaga, Polres Nias, strategi kepemimpinan

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mengemban misi penting dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib, makmur, dan berkeadilan. Konstitusi negara ini, yang telah mengalami perjalanan panjang dalam sejarah bangsa Indonesia, menjadi fondasi bagi pelaksanaan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik, Indonesia menjalankan pemerintahannya dalam kerangka demokrasi.

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, mencerminkan perwujudan dari prinsip demokrasi tersebut. Undang-Undang ini telah dirancang untuk mengantisipasi berbagai tindak pidana pemilu, dengan melibatkan empat institusi penting dalam penanganannya yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Khususnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2002, memegang peranan vital dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam konteks Pemilu, Polres, sebagai entitas penegak hukum di tingkat daerah, memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini menuntut pengembangan strategi kepemimpinan yang efektif dalam pengamanan Pemilu, terutama mengingat potensi konflik dan kerusuhan yang kerap menyertai momen politik penting ini. Keberhasilan pelaksanaan Pemilu yang aman, lancar, dan demokratis menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas kepemimpinan Polres.

Pemilu seringkali diwarnai dengan persaingan politik yang ketat dan emosi yang tinggi, memunculkan potensi konflik dan ketegangan sosial. Dalam menghadapi dinamika ini, strategi kepemimpinan yang efektif menjadi krusial untuk memastikan semua tugas pengamanan Pemilu dapat dilaksanakan dengan baik. Pengalaman dari Pemilu sebelumnya, yang kerap diwarnai kasus pelanggaran keamanan, konflik politik, dan kerusuhan, memberikan pelajaran berharga dalam membangun strategi yang lebih efektif untuk masa depan.

Di sisi lain, Polres harus mampu menjaga netralitas dalam situasi politik yang tegang, untuk tidak mengintervensi proses demokrasi. Tantangan ini menjadi lebih kompleks di wilayah dengan karakteristik unik, seperti Polres Nias. Nias, sebagai pulau di utara Sumatera, memiliki kekayaan budaya lokal, adat istiadat yang kuat, dan dinamika politik khusus yang mempengaruhi penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, topografi wilayah yang berbukit-bukit dan aksesibilitas terbatas menambah kompleksitas tugas pengamanan.

Oleh karena itu, penelitian yang lebih mendalam diperlukan untuk memahami dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi strategi kepemimpinan dalam pengamanan Pemilu di wilayah hukum Polres Nias. Penelitian ini akan memfokuskan pada fenomena masalah seperti budaya lokal yang kuat, geografi yang penuh tantangan, sensitivitas politik, peran tradisional kepemimpinan, dan keberagaman etnis, serta permasalahan spesifik yang muncul sebelum dan setelah pemilu.

Dengan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini mengangkat judul "Strategi Kepemimpinan Dalam Pengamanan Pemilu di Wilayah Hukum Polres Nias". Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas strategi kepemimpinan Polres Nias dalam mengamankan Pemilu, sehingga dapat memberikan rekomendasi strategis untuk pengamanan Pemilu yang lebih efektif di masa depan.

Kepemimpinan adalah kemampuan atau kekuatan dalam diri seseorang untuk memimpin dan mempengaruhi orang lain dalam bekerja, bertujuan mencapai target yang telah ditentukan. DuBrin (2018, p. 4) mendefinisikan pemimpin sebagai individu yang menunjukkan semangat, hasrat, dan memberi inspirasi untuk kinerja yang lebih baik, bergantung pada perilaku dan tindakan yang tepat, bukan hanya ciri pribadi dan keterampilan. Rivai et al. (2014, p. 2) dalam "Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi" menyatakan kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut, menginterpretasikan peristiwa, mengorganisasi aktivitas, dan memelihara kerjasama. Menurut Hasibuan (2019, p. 170), kepemimpinan adalah cara pemimpin mempengaruhi bawahan untuk kerjasama efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Istianto (2011, p. 87) menyajikan berbagai definisi kepemimpinan, termasuk aktivitas memimpin, hubungan antara atasan dan bawahan, dan proses yang berorientasi manusia yang mempengaruhi perilaku organisasi. Kesimpulan dari berbagai pengertian ini adalah bahwa kepemimpinan adalah cara pemimpin mempengaruhi bawahan untuk mencapai tujuan organisasi.

Sutrisno (2019, pp. 242–244) menguraikan berbagai gaya kepemimpinan, termasuk gaya persuasif, represif, partisipatif, inovatif, investigatif, inspektif, motivasi, naratif, edukatif, dan retrogresif. Copeland (2014) melihat kepemimpinan sebagai keterampilan mempengaruhi jiwa manusia, sering digunakan di berbagai bidang seperti politik, sosial, agama, industri, dan militer. Robbins & Judge (2023) mengidentifikasi empat jenis gaya kepemimpinan: kharismatik, transaksional, transformasional, dan visioner. Blake & Mouton (dalam Todariță, 2021) menyatakan lima gaya kepemimpinan modern, yaitu tidak peduli, condong pada manusia, condong pada produksi, cari keseimbangan, dan puncak kepemimpinan.

Fungsi pemimpin dalam manajemen organisasi terbagi menjadi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan. Perencanaan adalah proses awal menentukan tujuan dan cara pencapaiannya. Pengorganisasian adalah proses pembagian kerja dan kerjasama formal dan informal. Kepemimpinan adalah implementasi aransemen melalui dukungan orang lain.

Pengawasan adalah kemampuan pemimpin melakukan fungsi pengendalian. Menurut Sutrisno (2019, pp. 250–255) tugas-tugas kepemimpinan termasuk berperan sebagai konselor, instruktur, memimpin rapat, mengambil keputusan, dan mendelegasikan wewenang. Tugas-tugas ini mencakup interaksi langsung dengan sumber daya manusia, penyampaian instruksi, pembuatan dan implementasi rencana, serta pengalihan wewenang untuk efisiensi organisasi.

Valentine et al. (2019, p. 269) menyebutkan empat gaya kepemimpinan dalam pengambilan keputusan: instruksi, konsultasi, partisipasi, dan delegasi. Sutarto dalam Sutrisno (2019, p. 242) menekankan pentingnya pendekatan perilaku pemimpin, termasuk cara memberi perintah, komunikasi, membuat keputusan, dan memotivasi bawahan. Kepemimpinan otokratis dan demokratis merupakan dua kategori ekstrem dalam gaya kepemimpinan. Menurut Hersey et al. (2012, p. 63), hal ini meliputi jumlah dukungan sosio emosional dari pemimpin dan tingkat kematangan pengikut. Siagian (dalam Hutahayan, 2020) membedakan lima tipe kepemimpinan: otokratis, militeristik, paternalistik, kharismatis, dan demokratis, masing-masing dengan karakteristik tersendiri yang cocok untuk berbagai konteks organisasi. Kartono (dalam Goraph, 2020) mengaitkan kepemimpinan dengan kekuasaan, kewibawaan, kemampuan, dan implementasi strategi. Kepemimpinan efektif dalam pengamanan pemilu melibatkan peran berbagai pihak untuk memastikan proses yang aman, adil, dan transparan.

Pengamanan pemilu merujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk melindungi integritas, keamanan, dan keselamatan proses pemilihan umum. Hal ini mencakup perlindungan dari intervensi ilegal, manipulasi, kecurangan, intimidasi, atau ancaman terhadap pemilih, calon, maupun petugas pemilu. Aspek-aspek pengamanan meliputi keamanan fisik, keamanan teknis, pengawasan dan pemantauan, edukasi pemilih, serta hukum dan penegakan hukum. Tujuan dari pengamanan adalah untuk memastikan pemilu yang adil, bebas, transparan, dan akuntabel, yang penting dalam memelihara integritas demokrasi dan kepercayaan publik. Dasar hukum pengamanan dan pengawasan pemilu bervariasi tergantung pada negara. Di Indonesia, misalnya, dasar hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang lainnya, termasuk peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Setiap negara memiliki kerangka hukum tersendiri yang mengatur aspek pengamanan dan pengawasan pemilu, menekankan pada pentingnya merujuk pada undang-undang dan peraturan yang berlaku di negara masing-masing.

Gangguan selama pemilu dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketegangan politik, ketidakpuasan dan ketidakadilan, perbedaan etnis, agama, atau suku, pengaruh eksternal, serta kurangnya pengamanan dan pengawasan yang efektif. Faktor-faktor ini menimbulkan risiko gangguan selama pemilu, meningkatkan kemungkinan konflik dan kekerasan, serta mempengaruhi stabilitas proses pemilihan. Pentingnya pengamanan dan pengawasan yang komprehensif menjadi kunci dalam mencegah gangguan dan memastikan pemilu yang lancar dan damai.

Pemilu, sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia, berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Budiardjo et al. (2014) menekankan pentingnya lembaga-lembaga demokrasi dalam pelaksanaan pemilu, termasuk pemerintahan yang bertanggung jawab, dewan perwakilan rakyat, organisasi politik seperti partai-partai, pers dan media massa yang bebas, sistem peradilan independen, serta lembaga penegak hukum. Pemilu dianggap mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dengan hasil yang dihasilkan dalam suasana keterbukaan dan kebebasan berpendapat.

Dalam konteks pengamanan pemilu, peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sangat krusial. Kepolisian menjadi subjek penting dalam agenda politik, terutama dalam menjamin pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang menetapkan peran kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian berperan dalam menjamin keamanan selama proses pemilu, serta menangani pelanggaran yang berunsur pidana terkait pemilu, mulai dari tahap pelaporan oleh Bawaslu atau Panwaslu hingga penanganan kasus oleh kejaksaan. Tugas kepolisian dalam pengamanan pemilu mencerminkan komitmennya terhadap terciptanya keamanan dalam negeri, terutama selama pelaksanaan pemilu legislatif.

Strategi kepemimpinan dalam pengamanan pemilu di wilayah hukum Kepolisian Resort Nias merupakan hal yang sangat penting untuk dipahami dan diteliti. Dalam konteks ini, peran kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama pemilu merupakan aspek krusial yang memerlukan strategi kepemimpinan yang efektif. Penelitian ini memerlukan pendekatan kualitatif dengan studi kasus untuk memahami secara mendalam strategi kepemimpinan yang diterapkan dalam konteks pengamanan pemilu di wilayah hukum Kepolisian Resort Nias (Molina-Garzón et al., 2020;

Nalindro Nusantoro et al., 2022). Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti profesionalisme, legitimasi kepolisian, dan budaya kepolisian dalam merumuskan strategi kepemimpinan yang efektif. Dalam konteks ini, literatur mengenai reformasi pendidikan kepolisian, pelatihan, profesionalisme, polisi komunitas, legitimasi kepolisian, kode etik, dan budaya kepolisian dapat memberikan wawasan yang berharga dalam merancang strategi kepemimpinan yang tepat.

Selain itu, kebijakan penegakan hukum terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang diterapkan oleh kepolisian juga dapat memberikan perspektif yang relevan terkait dengan strategi kepemimpinan dalam konteks penegakan hukum di wilayah hukum Kepolisian Resort Nias. Dalam hal ini, data sekunder yang diperoleh dari studi literatur dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai implementasi kebijakan penegakan hukum yang dapat menjadi landasan bagi strategi kepemimpinan yang efektif (Prakosa et al., 2022; Thompson & Payne, 2019). Aspek hukum dan yuridis terkait dengan efektivitas pelaksanaan fungsi Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam wilayah hukum Kepolisian Daerah juga dapat memberikan perspektif yang relevan terkait dengan strategi kepemimpinan dalam konteks pengamanan pemilu. Memahami peran dan kewenangan Bhabinkamtibmas dalam konteks pengamanan pemilu dapat menjadi bagian integral dari strategi kepemimpinan yang efektif (Cen, 2020).

Dalam konteks pengamanan pemilu, penting juga untuk mempertimbangkan respons kepolisian terhadap perubahan politik dan sosial yang mungkin terjadi selama pemilu. Studi mengenai respons kepolisian terhadap revolusi Mesir dapat memberikan wawasan yang berharga terkait dengan strategi kepemimpinan dalam menghadapi perubahan politik yang signifikan. Memahami bagaimana kepolisian menanggapi perubahan politik dapat menjadi landasan yang penting dalam merumuskan strategi kepemimpinan yang adaptif dan responsif (Abdelmottlep, 2015). Dengan demikian, dalam merancang strategi kepemimpinan dalam pengamanan pemilu di wilayah hukum Kepolisian Resort Nias, penting untuk mempertimbangkan berbagai aspek yang mencakup peran kepolisian, profesionalisme, kebijakan penegakan hukum, aspek hukum dan yuridis, serta respons terhadap perubahan politik dan sosial. Dengan memperhatikan beragam perspektif ini, strategi kepemimpinan yang efektif dapat dirumuskan untuk memastikan keamanan dan ketertiban selama pemilu di wilayah hukum Kepolisian Resort Nias.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam mengenai strategi kepemimpinan dalam pengamanan pemilu di wilayah hukum Polres Nias (Creswell & Creswell, 2022; Lase et al., 2022; Moleong, 2017). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara detail dan komprehensif tentang fenomena yang diteliti dari perspektif para informan. Penelitian dilaksanakan di Kepolisian Resor Nias yang berkedudukan di Kota Gunungsitoli. Sumber data utama dalam penelitian ini meliputi Kepala Bagian Operasional Polres Nias, Paur Dalops Sibbag, dan Paurmin Bag Ops. Pemilihan sumber data dan informan dilakukan secara *purposive sampling* (Patton, 2015), dengan pertimbangan bahwa informan merupakan pihak yang paling memahami dan terlibat langsung dalam strategi kepemimpinan pengamanan pemilu di Polres Nias. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara (Bernard, 2017) mendalam. Wawancara dilakukan secara langsung dengan para informan untuk mendapatkan *insight* dan pemahaman yang mendalam mengenai strategi kepemimpinan yang diimplementasikan. Pertanyaan wawancara disusun secara sistematis untuk menggali informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan model interaktif (Miles et al., 2014). Analisis ini meliputi beberapa tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Melalui model ini, data diorganisir dan diinterpretasikan untuk menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipercaya.

HASIL DAN DISKUSI

Sekilas tentang Polres Nias

Polres Nias, yang merupakan unit Kepolisian Resort di tingkat kabupaten yang berlokasi di Jl. Bhayangkara No. 1 Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, Indonesia. Polres Nias bertugas menyelenggarakan fungsi Polri di wilayah Kabupaten Nias, meliputi penyelidikan dan penyidikan berbagai tindak pidana, termasuk ekonomi, korupsi, penipuan, dan kriminal. Awalnya, wilayah hukum Polres Nias meliputi seluruh Pulau Nias. Namun, sejak tahun 2003, setelah pemekaran wilayah yang menghasilkan Kabupaten Nias Selatan, dan kemudian pada tahun 2008, pembentukan Polres Nias Selatan, wilayah hukumnya kembali disesuaikan. Pada tahun yang sama, Kabupaten Nias juga

dimekarkan menjadi empat entitas administratif, termasuk Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, dan Kota Gunungsitoli, menyesuaikan kembali wilayah hukum Polres Nias.

Polres Nias menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mencakup memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi utama Polres Nias mencakup tugas pembinaan masyarakat (pre-emptif), tugas di bidang preventif untuk memelihara keamanan dan ketertiban, serta tugas di bidang represif yang melibatkan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Konsep *Community Policing* di Polres Nias diimplementasikan melalui kegiatan Babinkamtibmas dan sistem keamanan lingkungan (siskamling), yang menunjukkan pendekatan sosial dan mutualisme dengan masyarakat untuk menciptakan kondisi keamanan yang kondusif. Ini mencerminkan upaya Polres Nias dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan kesadaran hukum melalui kolaborasi yang erat antara polisi dan komunitas.

Strategi Kepemimpinan dalam Pengamanan Pemilu

Dalam rangka mengidentifikasi strategi kepemimpinan yang efektif dalam pengamanan Pemilu di Wilayah Hukum Polres Nias, wawancara dilakukan dengan tiga responden utama, yaitu Kabag Ops Polres Nias, Paur Dalops Sibbag, dan Paurmin Bag Ops. Berdasarkan wawancara tersebut, beberapa aspek kunci dalam strategi kepemimpinan untuk pengamanan Pemilu dapat dirangkum sebagai berikut.

1. Strategi kepemimpinan dalam pengamanan Pemilu di Polres Nias menekankan pada keterbukaan, kepatuhan hukum, dan kolaborasi antarpelaku. Hal ini menunjukkan komitmen Polres Nias untuk memastikan bahwa Pemilu berlangsung dalam suasana yang aman, adil, dan transparan.
2. Pengelolaan kekuasaan yang efektif oleh pemimpin Polres Nias memiliki dampak positif yang signifikan terhadap keamanan, kepercayaan masyarakat, dan stabilitas selama proses pemilu. Kepemimpinan yang bertanggung jawab dan bijaksana terbukti efektif dalam menciptakan kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan pemilu yang sukses.
3. Penggunaan kekuasaan secara efektif dalam pengamanan pemilu melibatkan perencanaan yang matang, operasi keamanan yang sesuai hukum dan transparan, pengawasan yang terus-menerus, dan komunikasi yang efektif dengan publik. Aspek-aspek ini menekankan pentingnya kepemimpinan yang berkompeten dan bertanggung jawab dalam memastikan pelaksanaan pemilu yang aman dan terkendali.
4. Kewibawaan seorang pemimpin memegang peranan penting dalam pengamanan pemilu. Kepercayaan, pengaruh positif terhadap perilaku masyarakat, serta kemampuan untuk memotivasi dan menginspirasi menjadi aspek kunci yang ditonjolkan oleh kewibawaan pemimpin. Hal ini menunjukkan bahwa kewibawaan tidak hanya memengaruhi bagaimana pemimpin dilihat oleh masyarakat, tetapi juga bagaimana mereka dapat efektif menjalankan strategi kepemimpinan dalam pengamanan pemilu.
5. Membangun dan memperkuat kewibawaan dalam konteks pengamanan pemilu melibatkan beberapa aspek penting, seperti menjaga integritas dan etika, komunikasi yang terbuka dan jelas, serta keterlibatan aktif dengan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kewibawaan pemimpin tidak hanya terkait dengan kapabilitas profesional mereka, tetapi juga bagaimana mereka berinteraksi dan membangun hubungan yang positif dengan masyarakat dan pihak terkait lainnya.
6. Untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan dalam pengamanan pemilu, pemimpin harus fokus pada pembelajaran berkelanjutan, memanfaatkan pengalaman masa lalu, dan menjadi responsif terhadap kebutuhan dan perubahan situasi. Kesiapan untuk belajar dan beradaptasi merupakan aspek penting yang menentukan efektivitas pemimpin dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan dinamis dalam pengamanan pemilu.
7. Kemampuan kepemimpinan yang kuat berperan penting dalam pengamanan pemilu. Aspek-aspek seperti perencanaan dan organisasi yang efektif, pencegahan risiko, penerapan hukum, menjaga netralitas, dan membangun kerjasama yang baik, semuanya penting dalam menciptakan lingkungan pemilu yang aman dan terkendali. Kemampuan kepemimpinan yang kuat memungkinkan pemimpin untuk mengelola sumber daya dan personel secara efisien, mengidentifikasi dan mengatasi risiko, serta berkoordinasi dengan efektif dengan pihak-pihak terkait.

8. Implementasi strategi kepemimpinan dalam pengamanan pemilu sangat penting karena berperan dalam koordinasi dan perencanaan yang efektif, respons cepat terhadap situasi darurat, dan memastikan kepatuhan terhadap hukum dan etika. Kemampuan kepemimpinan yang kuat dan strategis diperlukan untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung dalam kondisi yang aman, terkendali, dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Persepsi dan Pengalaman Pemimpin dalam Strategi Kepemimpinan Pengamanan Pemilu

Dalam upaya mendalami pemahaman tentang strategi kepemimpinan yang diterapkan dalam pengamanan pemilihan umum (Pemilu), penelitian ini menggali persepsi dan pengalaman langsung dari para pemimpin yang bertanggung jawab atas keamanan selama proses Pemilu di Wilayah Hukum Polres Nias. Melalui wawancara mendalam dengan tiga responden kunci: Kabag Ops Polres Nias, Paur Dalops Sibbag, dan Paurmin Bag Ops. Berikut adalah rangkuman hasil wawancara dengan informan kunci.

Dalam konteks pengamanan pemilihan umum, kewibawaan dan kemampuan kepemimpinan pemimpin memegang peranan yang tidak terpisahkan dalam menentukan kesuksesan operasi keamanan. Kewibawaan pemimpin tidak hanya fundamental dalam membangun kepercayaan dan rasa aman di kalangan masyarakat tetapi juga esensial dalam mengelola ketegangan dan konflik yang mungkin muncul selama proses pemilu. Lebih lanjut, kewibawaan tersebut berperan penting dalam menjamin netralitas dan integritas seluruh proses pemilu, aspek yang krusial untuk memastikan pemilu yang adil dan demokratis.

Kredibilitas, kepercayaan, dan kemampuan untuk menjalankan tugas secara adil dan efektif merupakan elemen kunci yang terkait erat dengan kewibawaan pemimpin dalam konteks pengamanan pemilu. Pemimpin dengan kewibawaan tinggi cenderung lebih berhasil dalam memotivasi dan menginspirasi baik personel keamanan maupun masyarakat umum, memastikan dukungan dan kerjasama yang luas dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama periode pemilu. Selain itu, kemampuan kepemimpinan yang kuat menjadi sangat penting dalam mengkoordinasikan semua aspek operasi keamanan. Hal ini mencakup perencanaan yang efektif, pengalokasian sumber daya yang bijaksana, serta pengelolaan konflik dengan cara yang meminimalisir potensi gangguan dan menjaga keamanan pemilu. Pemimpin yang efektif mampu mengidentifikasi dan menanggapi secara cepat dan tepat setiap tantangan yang muncul, memastikan bahwa proses pemilu dapat berjalan lancar dan aman.

Dengan memastikan bahwa semua aspek operasi keamanan dikelola dengan baik, pemimpin yang efektif tidak hanya menjamin kelancaran proses pemilu tetapi juga memelihara kepercayaan publik terhadap sistem pemilu. Ini merupakan indikasi bahwa kemampuan kepemimpinan dan kewibawaan tidak hanya berpengaruh pada aspek teknis pengamanan tetapi juga pada persepsi dan sikap masyarakat terhadap proses pemilu itu sendiri. Maka dari itu, kewibawaan dan kemampuan kepemimpinan yang kuat bukan hanya aset penting dalam pengamanan pemilu tetapi juga dalam memperkuat fondasi demokrasi melalui pemilu yang aman, adil, dan transparan. Pemimpin dengan atribut ini tidak hanya dihargai karena keahlian teknis mereka tetapi juga karena kemampuan mereka untuk membangun kepercayaan, menginspirasi kerjasama, dan memastikan integritas proses demokratis.

Strategi Kepemimpinan Efektif dalam Mengatasi Tantangan Pengamanan Pemilu

Dalam menjalankan tugas pengamanan Pemilu, Polres Nias menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang kompleks dan dinamis. Berikut adalah temuan penelitian berdasarkan wawancara dengan tiga orang informan kunci yaitu Kabag Ops Polres Nias, Paur Dalops Sibbag, dan Paurmin Bag Ops.

Dalam menjalankan tugas pengamanan pemilu, pemimpin dihadapkan pada berbagai tantangan kritis yang menuntut kemampuan navigasi yang efektif untuk memastikan kesuksesan. Tantangan ini meliputi menjaga netralitas dan integritas pemilu di tengah tekanan politik yang intens, menghadapi ketidakpastian dan kemampuan untuk merespons dengan cepat terhadap situasi darurat, serta memastikan keamanan personel yang berada di garis depan. Kunci dari pengamanan pemilu yang sukses terletak pada kemampuan pemimpin untuk mengatasi tantangan-tantangan ini secara efektif.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan perencanaan yang matang dan koordinasi yang baik antar lembaga yang terlibat dalam pengamanan pemilu. Pemeliharaan netralitas dan independensi menjadi sangat penting, memastikan bahwa semua tindakan pengamanan dilakukan tanpa bias politik dan selalu berlandaskan pada prinsip hukum dan keadilan. Kesiapan dan kerjasama yang baik antar

berbagai pihak, termasuk lembaga keamanan, penyelenggara pemilu, pengamat pemilu, dan masyarakat, menjadi faktor kunci dalam memastikan respons yang cepat dan efektif terhadap setiap situasi yang muncul.

Komponen penting lainnya adalah komitmen terhadap prinsip hukum dan keadilan. Pemimpin dalam pengamanan pemilu harus menunjukkan dedikasi yang tak tergoyahkan terhadap penegakan hukum dan keadilan, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan kerangka hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip demokrasi. Melalui pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi, yang mengedepankan prinsip-prinsip ini, pemimpin dapat mengatasi tantangan yang muncul dan memastikan bahwa pemilu berlangsung dalam kondisi yang aman, damai, dan adil.

Dengan demikian, peran pemimpin dalam pengamanan pemilu tidak hanya sebagai pengawas keamanan tetapi juga sebagai penjamin integritas proses demokrasi. Mereka harus menavigasi kompleksitas situasi dengan bijaksana, memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan diambil dengan pertimbangan yang matang dan selalu berorientasi pada tujuan utama yaitu pemilu yang sukses. Melalui strategi kepemimpinan yang efektif dan adaptif, tantangan dalam pengamanan pemilu dapat diatasi, menjadikan proses pemilu sebagai perwujudan dari praktik demokrasi yang sehat dan inklusif.

Diskusi/Pembahasan

Strategi dan Prinsip Kepemimpinan dalam Pengamanan Pemilu

1. Menjaga netralitas dan integritas pemilu di tengah tekanan politik
Kepemimpinan dalam konteks pemerintahan dan politik sering menekankan pentingnya netralitas dan integritas. Menurut teori kepemimpinan transformasional, pemimpin yang efektif adalah mereka yang dapat menginspirasi dan memotivasi pengikutnya untuk mencapai standar etika dan integritas yang lebih tinggi (Bass & Riggio, 2006 dalam Susanto et al., 2023). Studi yang dilakukan Siregar (2019) memberikan perspektif penting mengenai peran Polri dalam menjaga netralitas serta keterlibatan mereka dalam proses demokrasi elektoral di Indonesia.
2. Menghadapi ketidakpastian dan merespons situasi darurat
Kemampuan pemimpin untuk merespons secara cepat dan efektif terhadap situasi darurat menandakan pentingnya fleksibilitas dan ketangkasan dalam kepemimpinan, seperti yang dijelaskan dalam teori kepemimpinan situasional Hersey & Blanchard (dalam Hakim et al., 2021). Kepemimpinan yang efektif memerlukan adaptasi dengan situasi yang berubah dan membuat keputusan cepat dalam keadaan yang tidak pasti, khususnya selama periode pemilu yang sering kali tidak dapat diprediksi. Dalam manajemen krisis, respons cepat dan efektif terhadap situasi darurat diakui sebagai salah satu komponen kunci. Menurut Weick & Sutcliffe (2016), organisasi yang memiliki kemampuan '*mindfulness*' mampu menanggapi krisis dengan lebih baik. Penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Innes & Booher (2018), mendukung gagasan bahwa koordinasi lintas lembaga dan komunikasi yang efisien sangat penting dalam manajemen situasi darurat.
3. Memastikan keamanan personel di garis depan
Pemimpin harus memastikan keamanan personel yang berada di garis depan pengamanan pemilu. Personel dapat menjadi sasaran ancaman, serangan, atau tindakan kekerasan selama pemilu, membuat keamanan personel menjadi prioritas utama. Untuk memastikan keamanan personel Polri di garis depan dalam rangka pengamanan Pemilu, Polri melakukan beberapa langkah, antara lain: (a) memberikan pelatihan khusus kepada personel yang bertugas di garis depan dalam pengamanan Pemilu, seperti pelatihan taktik, pengendalian kerumunan, dan penanganan situasi darurat; (b) personel yang bertugas di garis depan dilengkapi dengan perlengkapan yang memadai, seperti alat pelindung diri, senjata, dan kendaraan patroli, (c) melakukan perencanaan taktis yang matang untuk memastikan keamanan personel di garis depan, termasuk dalam hal pengaturan keamanan dan respons terhadap situasi darurat, (d) bekerja sama dengan lembaga terkait seperti KPU dan Bawaslu untuk memastikan keamanan selama proses pemilu berlangsung.
4. Perencanaan yang matang dan koordinasi antar lembaga
Strategi yang melibatkan perencanaan matang dan koordinasi yang efisien antar lembaga mencerminkan prinsip-prinsip manajemen proyek dan kerjasama organisasi. Kemampuan untuk mengatur sumber daya, merencanakan secara strategis, dan bekerja sama dengan berbagai stakeholder adalah aspek penting dari kepemimpinan efektif dalam manajemen keamanan (Institute, 2021; Waruwu et al., 2023). Dalam literatur manajemen proyek, perencanaan yang

matang dan koordinasi yang efektif dikenal sebagai kunci sukses pelaksanaan proyek (Kerzner, 2022). Koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga ini akan mendukung terciptanya pemilu yang aman, tertib, dan adil. Dengan demikian, upaya-upaya ini akan memastikan terlaksananya pemilu yang demokratis dan berkualitas..

5. Pemeliharaan netralitas dan independensi

Pemeliharaan netralitas dan independensi dalam pengamanan pemilu menyoroti aspek etika dalam kepemimpinan. Menurut (Brown et al., 2005 dalam Rantika & Yustina, 2017), pemimpin etis bertindak berdasarkan nilai dan prinsip moral yang mereka anut, termasuk keadilan dan kejujuran, yang sangat penting dalam konteks pemilu. Lebih lanjut, Rawls (dalam Sari, 2020) dalam teorinya tentang keadilan, pemeliharaan netralitas dan independensi adalah esensial untuk memastikan keadilan dan keadilan prosedural.

6. Komitmen terhadap hukum dan keadilan

Pentingnya komitmen terhadap hukum dan keadilan menggambarkan kepemimpinan yang berorientasi pada aturan hukum dan prinsip keadilan. Hal ini sesuai dengan teori keadilan organisasional yang menyatakan bahwa prosedur yang adil dalam organisasi, termasuk dalam pengamanan pemilu, dapat meningkatkan legitimasi dan dukungan dari mereka yang terpengaruh oleh keputusan tersebut (Colquitt et al., 2001 dalam Arisanti, 2023).

Peran Kewibawaan Pemimpin dalam Pengamanan Pemilu

Kewibawaan pemimpin memainkan peran penting dalam strategi kepemimpinan pengamanan pemilu. Kewibawaan membantu membangun kepercayaan dan rasa aman di masyarakat, mengelola ketegangan dan konflik, serta menjamin netralitas dan integritas dalam proses pemilu. Kredibilitas, kepercayaan, dan kemampuan untuk menjalankan tugas dengan adil dan efektif menjadi aspek penting yang dikaitkan dengan kewibawaan pemimpin dalam konteks pengamanan pemilu.

Temuan penelitian yang menyoroti peran kewibawaan pemimpin dalam strategi kepemimpinan pengamanan pemilu menggarisbawahi pentingnya karakteristik kepemimpinan ini dalam memastikan proses pemilu yang aman dan adil. Kewibawaan pemimpin tidak hanya mempengaruhi persepsi keamanan dan kepercayaan masyarakat tetapi juga berperan dalam mengelola dan meredakan ketegangan serta konflik, sambil mempertahankan netralitas dan integritas selama pemilu.

1. Pembangunan kepercayaan dan rasa aman

Kewibawaan pemimpin yang kuat membantu dalam membangun kepercayaan dan rasa aman di kalangan masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh (Mishra, 1996 dalam Silla et al., 2020), kepercayaan merupakan elemen kunci dalam hubungan antara pemimpin dan pengikut, yang berdampak positif pada efektivitas organisasi. Dalam konteks pengamanan pemilu, pemimpin yang memiliki kewibawaan tinggi dilihat sebagai lebih mampu menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilu.

2. Pengelolaan ketegangan dan konflik

Kewibawaan pemimpin juga penting dalam mengelola ketegangan dan konflik yang mungkin muncul selama periode pemilu. Teori konflik dan negosiasi menunjukkan bahwa pemimpin dengan kewibawaan yang tinggi lebih efektif dalam meredakan ketegangan dan mencapai resolusi konflik yang memuaskan semua pihak (Goldberg, 2019). Kemampuan ini sangat penting dalam konteks pemilu, di mana emosi dan taruhan politik sering kali tinggi.

3. Menjamin netralitas dan integritas

Selanjutnya, kewibawaan pemimpin memainkan peran krusial dalam menjamin netralitas dan integritas selama proses pemilu. Netralitas dan integritas adalah fondasi dari pemilu yang adil dan bebas, dan pemimpin yang dihormati memiliki kapasitas yang lebih besar untuk mempertahankannya di hadapan tekanan politik dan sosial. Sebagaimana dijelaskan oleh Levi (2019), integritas institusional sangat bergantung pada kewibawaan individu-individu yang memimpinya, yang pada gilirannya mempengaruhi legitimasi dan keefektifan institusi tersebut dalam menjalankan tugasnya.

Penelitian oleh Tyler (2021) tentang legitimasi kekuasaan dan kepatuhan hukum menegaskan bahwa kewibawaan pemimpin mempengaruhi sejauh mana individu menganggap keputusan yang diambil oleh pemimpin tersebut sebagai sah dan adil, yang krusial dalam konteks pengamanan pemilu. Selain itu, Blau (dalam Benitez et al., 2022) tentang pertukaran sosial dan dinamika kekuasaan

menunjukkan bahwa kewibawaan dapat meningkatkan kepatuhan dan kerjasama, yang penting untuk menjaga ketertiban selama pemilu.

Dengan demikian, kewibawaan pemimpin merupakan aspek penting yang tidak hanya mempengaruhi persepsi keamanan dan kepercayaan masyarakat tetapi juga kemampuan untuk mengelola ketegangan, konflik, serta mempertahankan netralitas dan integritas pemilu. Penelitian ini menegaskan pentingnya memilih dan mengembangkan pemimpin dengan kewibawaan tinggi dalam konteks pengamanan pemilu, mengingat dampak signifikan mereka terhadap kesuksesan proses pemilu.

Strategi Kepemimpinan dan Manajemen Keamanan dalam Pengamanan Pemilu: Tantangan dan Solusi

Tantangan dan strategi dalam pengamanan pemilu menggarisbawahi beberapa poin penting yang konsisten dengan literatur dan studi sebelumnya dalam bidang kepemimpinan dan manajemen keamanan pemilu.

1. Menjaga netralitas dan integritas pemilu di tengah tekanan politik

Kepemimpinan dalam konteks pemerintahan dan politik sering menekankan pentingnya netralitas dan integritas. Menurut teori kepemimpinan transformasional, pemimpin yang efektif adalah mereka yang dapat menginspirasi dan memotivasi pengikutnya untuk mencapai standar etika dan integritas yang lebih tinggi (Bass & Riggio, 2006 dalam Susanto et al., 2023). Studi yang dilakukan Siregar (2019) memberikan perspektif penting mengenai peran Polri dalam menjaga netralitas serta keterlibatan mereka dalam proses demokrasi elektoral di Indonesia.

2. Menghadapi ketidakpastian dan merespons situasi darurat

Kemampuan pemimpin untuk merespons secara cepat dan efektif terhadap situasi darurat menandakan pentingnya fleksibilitas dan ketangkasan dalam kepemimpinan, seperti yang dijelaskan dalam teori kepemimpinan situasional Hersey & Blanchard (dalam Hakim et al., 2021). Kepemimpinan yang efektif memerlukan adaptasi dengan situasi yang berubah dan membuat keputusan cepat dalam keadaan yang tidak pasti, khususnya selama periode pemilu yang sering kali tidak dapat diprediksi. Dalam manajemen krisis, respons cepat dan efektif terhadap situasi darurat diakui sebagai salah satu komponen kunci. Menurut Weick & Sutcliffe (2016), organisasi yang memiliki kemampuan '*mindfulness*' mampu menanggapi krisis dengan lebih baik. Penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Innes & Booher (2018), mendukung gagasan bahwa koordinasi lintas lembaga dan komunikasi yang efisien sangat penting dalam manajemen situasi darurat.

3. Memastikan keamanan personel di garis depan

Pemimpin harus memastikan keamanan personel yang berada di garis depan pengamanan pemilu. Personel dapat menjadi sasaran ancaman, serangan, atau tindakan kekerasan selama pemilu, membuat keamanan personel menjadi prioritas utama. Untuk memastikan keamanan personel Polri di garis depan dalam rangka pengamanan Pemilu, Polri dapat melakukan beberapa langkah, antara lain: (a) memberikan pelatihan khusus kepada personel yang bertugas di garis depan dalam pengamanan Pemilu, seperti pelatihan taktik, pengendalian kerumunan, dan penanganan situasi darurat; (b) personel yang bertugas di garis depan dilengkapi dengan perlengkapan yang memadai, seperti alat pelindung diri, senjata, dan kendaraan patroli, (c) melakukan perencanaan taktis yang matang untuk memastikan keamanan personel di garis depan, termasuk dalam hal pengaturan keamanan dan respons terhadap situasi darurat, (d) bekerja sama dengan lembaga terkait seperti KPU dan Bawaslu untuk memastikan keamanan selama proses pemilu berlangsung.

4. Perencanaan yang matang dan koordinasi antar lembaga

Strategi yang melibatkan perencanaan matang dan koordinasi yang efisien antar lembaga mencerminkan prinsip-prinsip manajemen proyek dan kerjasama organisasi. Kemampuan untuk mengatur sumber daya, merencanakan secara strategis, dan bekerja sama dengan berbagai stakeholder adalah aspek penting dari kepemimpinan efektif dalam manajemen keamanan (Institute, 2021). Dalam literatur manajemen proyek, perencanaan yang matang dan koordinasi yang efektif dikenal sebagai kunci sukses pelaksanaan proyek (Kerzner, 2022). Koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga ini akan mendukung terciptanya pemilu yang aman, tertib, dan adil. Dengan demikian, upaya-upaya ini akan memastikan terlaksananya pemilu yang demokratis dan berkualitas.

5. Pemeliharaan netralitas dan independensi

Pemeliharaan netralitas dan independensi dalam pengamanan pemilu menyoroti aspek etika dalam kepemimpinan. Menurut (Brown et al., 2005 dalam Rantika & Yustina, 2017), pemimpin etis bertindak berdasarkan nilai dan prinsip moral yang mereka anut, termasuk keadilan dan kejujuran, yang sangat penting dalam konteks pemilu. Lebih lanjut, Rawls (dalam Sari, 2020) dalam teorinya tentang keadilan, pemeliharaan netralitas dan independensi adalah esensial untuk memastikan keadilan dan keadilan prosedural.

6. Komitmen terhadap Hukum dan Keadilan

Pentingnya komitmen terhadap hukum dan keadilan menggambarkan kepemimpinan yang berorientasi pada aturan hukum dan prinsip keadilan. Hal ini sesuai dengan teori keadilan organisasional yang menyatakan bahwa prosedur yang adil dalam organisasi, termasuk dalam pengamanan pemilu, dapat meningkatkan legitimasi dan dukungan dari mereka yang terpengaruh oleh keputusan tersebut (Colquitt et al., 2001 dalam Arisanti, 2023).

KESIMPULAN

Penelitian tentang strategi kepemimpinan dalam pengamanan Pemilu di Wilayah Hukum Polres Nias, menunjukkan bahwa kewibawaan dan kemampuan kepemimpinan yang efektif memegang peranan kunci dalam memastikan pelaksanaan pemilu yang aman, adil, dan transparan. Strategi kepemimpinan yang diimplementasikan oleh Polres Nias menekankan pada pentingnya keterbukaan, kepatuhan terhadap hukum, dan kolaborasi antarlembaga serta dengan masyarakat. Ini menunjukkan komitmen kuat Polres Nias untuk menciptakan suasana pemilu yang kondusif. Kepemimpinan yang bertanggung jawab dan bijaksana dalam pengelolaan kekuasaan berkontribusi signifikan terhadap keamanan, kepercayaan masyarakat, dan stabilitas selama proses pemilu. Strategi kepemimpinan yang sukses dalam pengamanan pemilu juga melibatkan perencanaan yang matang dan komunikasi yang efektif dengan semua pihak terkait.

Kewibawaan pemimpin merupakan elemen penting yang membantu dalam membangun kepercayaan dan rasa aman di masyarakat, mengelola ketegangan dan konflik, serta menjamin netralitas dan integritas proses pemilu. Pemimpin yang memiliki kewibawaan tinggi lebih mampu memotivasi dan menginspirasi, mempengaruhi perilaku masyarakat secara positif. Untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan dalam pengamanan pemilu, pemimpin harus berfokus pada pembelajaran berkelanjutan dan responsivitas terhadap perubahan situasi. Kesiapan untuk belajar dari pengalaman dan beradaptasi dengan tantangan yang kompleks dan dinamis adalah kunci untuk kepemimpinan yang efektif. Kemampuan kepemimpinan yang kuat adalah kunci untuk menangani berbagai aspek pengamanan pemilu, termasuk perencanaan dan organisasi yang efektif, pencegahan risiko, penerapan hukum, dan menjaga netralitas. Kepemimpinan yang efektif memungkinkan pengelolaan sumber daya dan personel secara efisien dan berkoordinasi efektif dengan semua pihak terkait.

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa strategi kepemimpinan dalam pengamanan pemilu sangat bergantung pada kewibawaan, kemampuan adaptasi, dan komitmen terhadap prinsip hukum dan keadilan. Kesuksesan pengamanan pemilu tidak hanya diukur dari kelancaran proses pemungutan suara, tetapi juga dari kemampuan pemimpin dalam menjaga integritas dan netralitas proses demokrasi, membangun kepercayaan publik, serta memastikan keamanan dan ketertiban umum.

Implikasi Hasil Penelitian

Penelitian tentang strategi kepemimpinan dalam pengamanan Pemilu di Wilayah Hukum Polres Nias, yang melibatkan wawancara mendalam dengan Kabag Ops Polres Nias, Paur Dalops Sibbag, dan Paurmin Bag Ops, menghasilkan temuan yang memiliki implikasi signifikan bagi praktik kepolisian, pembuat kebijakan, serta pengembangan program pelatihan kepemimpinan. Hasil penelitian ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk mengembangkan kewibawaan dan kemampuan kepemimpinan di antara petugas kepolisian, dengan fokus khusus pada pembangunan kepercayaan, pengelolaan konflik, dan pemeliharaan netralitas serta integritas selama pemilu.

Temuan ini menunjukkan perlunya memperkuat strategi komunikasi baik di dalam organisasi kepolisian maupun dengan masyarakat dan lembaga terkait lainnya. Ini mencakup pentingnya dialog terbuka dan komunikasi efektif untuk membangun hubungan yang positif dan memastikan pemilu berlangsung dalam suasana yang aman dan damai. Implikasi lain dari penelitian ini adalah perlunya

merumuskan atau merevisi kebijakan pengamanan Pemilu yang mempertimbangkan keterbukaan, kepatuhan hukum, dan kolaborasi antarlembaga, serta memastikan alokasi sumber daya yang memadai untuk keamanan personel kepolisian di garis depan.

Selanjutnya, hasil penelitian ini dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum pelatihan kepemimpinan di akademi kepolisian atau program pelatihan lainnya, dengan fokus pada pengembangan keterampilan pengelolaan kekuasaan yang efektif, pengambilan keputusan di bawah tekanan, dan pemeliharaan etika profesional. Implementasi simulasi dan latihan yang berfokus pada skenario pengamanan Pemilu dapat membantu mempersiapkan petugas kepolisian untuk tantangan nyata yang mereka hadapi di lapangan.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian tentang strategi kepemimpinan dalam pengamanan Pemilu di Wilayah Hukum Polres Nias memberikan wawasan berharga namun dihadapkan pada sejumlah keterbatasan yang penting untuk diperhatikan dalam memahami konteks dan aplikabilitas temuan. Pertama, penelitian ini terfokus pada satu wilayah geografis yang spesifik, yaitu Polres Nias, yang membatasi kemampuan untuk menggeneralisasi temuan ke wilayah lain dengan dinamika sosial-politik dan tantangan keamanan yang berbeda. Kedua, keterbatasan jumlah responden, yang hanya melibatkan tiga informan kunci, berpotensi meninggalkan perspektif lain yang belum tergal, termasuk dari petugas kepolisian tingkat bawah atau pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam proses pemilu.

Selanjutnya, penelitian ini berfokus pada aspek kepemimpinan tanpa menjelajahi secara mendalam faktor lain yang juga mempengaruhi keberhasilan pengamanan Pemilu, seperti sumber daya keuangan, teknologi, dan dukungan eksternal. Temuan penelitian juga terikat pada konteks waktu dan situasi politik tertentu di Wilayah Hukum Polres Nias, yang dapat berubah dan mempengaruhi relevansi strategi kepemimpinan yang diidentifikasi. Selain itu, penelitian ini mengandalkan pada data kualitatif yang diperoleh dari wawancara mendalam, yang sementara memberikan pemahaman yang kaya, namun bisa mendapat manfaat dari pendekatan kuantitatif untuk memberikan ukuran yang lebih objektif mengenai efektivitas strategi kepemimpinan.

REFERENSI

- Abdelmottlep, M. A. (2015). The Egyptian Revolution: An Analysis of the Egyptian Police Response, the Way to the Egyptian Police Reform (Subjective Projection). *Foresic Research & Criminology International Journal*, 1(5). <https://doi.org/10.15406/frcij.2015.01.00030>
- Arisanti, Y. (2023a). REVIEW STUDI KONFIGURASI KEADILAN ORGANISASIONAL DAN MODAL SOSIAL. *Media Bina Ilmiah*, 17(7), 1347–1352. <https://doi.org/10.33578/mbi.v17i7.263>
- Arisanti, Y. (2023b). REVIEW STUDI KONFIGURASI KEADILAN ORGANISASIONAL DAN MODAL SOSIAL. *Media Bina Ilmiah*, 17(7), 1347–1352. <https://doi.org/10.33578/mbi.v17i7.263>
- Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). *Transformational Leadership*. Psychology Press. <https://doi.org/10.4324/9781410617095>
- Benitez, G. B., Ayala, N. F., & Frank, A. G. (2022). How can SMEs participate successfully in Industry 4.0 ecosystems? In *The Digital Supply Chain* (pp. 325–339). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-91614-1.00019-8>
- Bernard, H. R. (2017). *Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches* (6th ed.). Rowman & Littlefield.
- Brown, M. E., Treviño, L. K., & Harrison, D. A. (2005a). Ethical leadership: A social learning perspective for construct development and testing. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 97(2), 117–134. <https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2005.03.002>
- Brown, M. E., Treviño, L. K., & Harrison, D. A. (2005b). Ethical leadership: A social learning perspective for construct development and testing. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 97(2), 117–134. <https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2005.03.002>
- Budiardjo, M., Soeseno, N., Evaquarta, R., & Anugrah, P. (2014). *Pengantar Ilmu Politik* (1st ed.). Universitas Terbuka.
- Cen, C. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Bhayangkara Pembina

- Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Dalam Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau. *Journal of Law and Policy Transformation*, 5(2), 29–45. <https://doi.org/10.37253/jlpt.v5i2.1316>
- Colquitt, J. A., Conlon, D. E., Wesson, M. J., Porter, C. O. L. H., & Ng, K. Y. (2001a). Justice at the millennium: A meta-analytic review of 25 years of organizational justice research. *Journal of Applied Psychology*, 86(3), 425–445. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.86.3.425>
- Colquitt, J. A., Conlon, D. E., Wesson, M. J., Porter, C. O. L. H., & Ng, K. Y. (2001b). Justice at the millennium: A meta-analytic review of 25 years of organizational justice research. *Journal of Applied Psychology*, 86(3), 425–445. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.86.3.425>
- Copeland, M. K. (2014). The Emerging Significance of Values Based Leadership: A Literature Review. *International Journal of Leadership Studies*, 8(2), 105–135. <https://www.regent.edu/journal/international-journal-of-leadership-studies/significance-of-values-based-leadership/>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6th ed.). SAGE Publications, Inc.
- DuBrin, A. J. (2018). *Leadership: Research Findings, Practice, and Skills* (9th ed.). Cengage Learning. 978-0357042496
- Goldberg, S. B. (2019). Trump's Approach to Conflict Resolution: Effect on Disputants and Neutrals. *Negotiation Journal*, 35(1), 163–166. <https://doi.org/10.1111/nej.12261>
- Goraph, F. A. (2020). *Organisasi dan Manajemen Pemerintahan*. CV Pilar Nusantara.
- Hakim, A. L., Faizah, E. N., & Mas'adah, N. (2021a). ANALYSIS OF LEADERSHIP STYLE BY USING THE MODEL OF HERSEY AND BLANCHARD. *Journal of Leadership in Organizations*, 3(2). <https://doi.org/10.22146/jlo.64390>
- Hakim, A. L., Faizah, E. N., & Mas'adah, N. (2021b). ANALYSIS OF LEADERSHIP STYLE BY USING THE MODEL OF HERSEY AND BLANCHARD. *Journal of Leadership in Organizations*, 3(2). <https://doi.org/10.22146/jlo.64390>
- Hasibuan, M. S. P. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.
- Hersey, P., Blanchard, K., & Johnson, D. (2012). *Management of Organizational Behavior* (10th ed.). Pearson.
- Hutahayan, B. (2020). *Kepemimpinan: Teori dan Praktik*. Deepublish.
- Innes, J. E., & Booher, D. E. (2018a). *Planning with Complexity* (2nd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315147949>
- Innes, J. E., & Booher, D. E. (2018b). *Planning with Complexity* (2nd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315147949>
- Institute, P. M. (2021). *The Standard for Program Management* (7th ed.). Project Management Institute.
- Istianto, B. (2011). *Manajemen Pemerintahan Dalam Perspective Pelayanan Publik* (2nd ed.). Mitra Wacana Media.
- Kerzner, H. (2022). *PROJECT MANAGEMENT* (13th ed.). Wiley.
- Lase, D., Zega, T. G. C., Daeli, D. O., & Zaluchu, S. E. (2022). Parents' perceptions of distance learning during COVID-19 in rural Indonesia. *Journal of Education and Learning (EduLearn)*, 16(1), 103–113. <https://doi.org/10.11591/edulearn.v16i1.20122>
- Levi, M. (2019). Trustworthy Government and Legitimizing Beliefs. *Nomos*, 61, 362–384. <https://www.jstor.org/stable/26786321>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Mishra, A. K. (1996). Organizational Responses to Crisis: The Centrality of Trust. In *Trust in Organizations: Frontiers of Theory and Research* (pp. 261–287). SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/10.4135/9781452243610.n13>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Molina-Garzón, A. L., Moreno-Daza, J., & Velásquez-Aponte, D. (2020). Liderazgo desde la perspectiva de la Red de Internacionalización Educativa Policial. *Revista Logos, Ciencia & Tecnología*, 12(3). <https://doi.org/10.22335/rlct.v12i3.1186>
- Nalindro Nusantoro, Arthur Josias Simon Runturambi, Hendy Febrianto Kurniawan, & Mandira, I. M. C. (2022). PERAN KEPOLISIAN DALAM PENINDAKAN KEJAHATAN LINTAS NEGARA DI KAWASAN PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA. *Journal Publicuho*, 5(4), 1139–

1148. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.39>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice* (4th ed.). SAGE Publications, Inc.
- Prakosa, C. D., Ma'ruf, U., & Sulchan, A. (2022). The Law Enforcement Policy On Traffic Accident By Police. *Law Development Journal*, 4(3), 347. <https://doi.org/10.30659/ldj.4.3.347-354>
- Rantika, S. D., & Yustina, A. I. (2017a). EFFECTS OF ETHICAL LEADERSHIP ON EMPLOYEE WELL-BEING: THE MEDIATING ROLE OF PSYCHOLOGICAL EMPOWERMENT. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 32(2), 121. <https://doi.org/10.22146/jieb.22333>
- Rantika, S. D., & Yustina, A. I. (2017b). EFFECTS OF ETHICAL LEADERSHIP ON EMPLOYEE WELL-BEING: THE MEDIATING ROLE OF PSYCHOLOGICAL EMPOWERMENT. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 32(2), 121. <https://doi.org/10.22146/jieb.22333>
- Rivai, V., Hadad, M. D., & Ramly, M. (2014). *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi* (4th ed.). Rajawali Pers.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2023). *Organizational Behavior* (19th ed.). Pearson.
- Sari, C. M. A. (2020a). Rawls's Theory of Justice and its Relevance in Analyzing Injustice on Ethnic Phenomenon. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 210–219. <https://doi.org/10.29333/ejecs/497>
- Sari, C. M. A. (2020b). Rawls's Theory of Justice and its Relevance in Analyzing Injustice on Ethnic Phenomenon. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 210–219. <https://doi.org/10.29333/ejecs/497>
- Silla, I., Gamero, N., & Picazo, C. (2020). The Cross-level Relationship Between Organizational Trust in Leadership and Job Satisfaction. *Revista Psicologia: Organizações & Trabalho*, 20, 1275–1283. <https://doi.org/10.17652/rpot/2020.4.12>
- Siregar, S. N. (2019). Netralitas Polri Menjelang Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1), 35. <https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.777>
- Susanto, B., Tukiran, M., & Wiguna, W. (2023). THE RELATIONSHIP BETWEEN TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP AND JOB SATISFACTION: A LITERATURE REVIEW. *International Journal of Economy, Education and Entrepreneurship*, 3(2), 542–552. <https://doi.org/10.53067/ije3.v3i2.177>
- Sutrisno, E. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Cetakan ke). Kencana Prenada Media Group.
- Thompson, & Payne. (2019). Towards Professionalism and Police Legitimacy? An Examination of the Education and Training Reforms of the Police in the Republic of Ireland. *Education Sciences*, 9(3), 241. <https://doi.org/10.3390/educsci9030241>
- Todăriță, E.-T. (2021). Leadership Style Determination according to Robert Blake and Jane Mouton's Managerial Grid. *International Conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION*, 27(1), 241–246. <https://doi.org/10.2478/kbo-2021-0037>
- Tyler, T. R. (2021). *Why People Obey the Law*. Princeton University Press.
- Valentine, S. R., Meglich, P., Mathis, R. L., & Jackson, J. H. (2019). *Human Resource Management* (16th ed.). Cengage Learning.
- Waruwu, E., Waruwu, S., Ndraha, A. B., Telaumbanua, A., Lase, D., Halawa, F., Bate'e, M. M., Waruwu, M. H., Mendrofa, S. A., Laoli, A., Halawa, O., & Gea, M. (2023). *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia* (M. Silalahi (ed.)). Future Science.
- Weick, K. E., & Sutcliffe, K. M. (2016). *Managing the Unexpected: Resilient Performance in an Age of Uncertainty* (2nd ed.). Audible Studios on Brilliance.